# Terus Genjot Penerimaan Pajak BPHTB

**Selasa, 11 Juni 2019**

Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Pasuruan masih minim hingga kuartal pertama tahun ini. Dari target Rp 106,1 miliar, baru terealisasi Rp 17,7 miliar atau sekitar 16,69 persen. Idealnya, realisasi di kuartal pertama mencapai 33 persen.

Minimnya penerimaan BPHTB disebabkan oleh investor yang masih menunggu kepastian terkait Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru. Investor cenderung menunggu kepastian sebelum berinvestasi di Kabupaten Pasuruan.

Meskipun realisasi masih rendah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan optimis target Rp 106,1 miliar dapat tercapai di akhir tahun. Mereka berharap pengesahan Perda RTRW dapat mendorong investasi dan transaksi jual beli tanah.

BKD terus berkoordinasi dengan notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk memaksimalkan penerimaan BPHTB. Evaluasi akan dilakukan di semester pertama untuk menyesuaikan target di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang.

BKD Kabupaten Pasuruan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan BPHTB melalui berbagai strategi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Mereka berharap dengan terbitnya Perda RTRW, investasi dan transaksi jual beli tanah dapat meningkat dan mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*